

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep kependudukan dan pembangunan tidak dapat dipisahkan. Seperti yang terpatri pada *international conference on population and development* tahun 1994 di Cairo yang mendeklarasikan bahwa penduduk merupakan pusat dari pembangunan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Pembangunan yang sesungguhnya merupakan pembangunan manusia yang seutuhnya. Memahami perilaku penduduk merupakan salah satu cara untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang ramah bagi penduduk. Salah satu dari perilaku penduduk tersebut adalah keputusan untuk melakukan mobilitas (BPS, 2010). Permasalahan mengenai mobilitas penduduk ini sudah cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah, terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan yang mengatur tentang pola mobilitas penduduk, arah kebijakan, dan penyelenggaraan pengarahannya mobilitas penduduk, serta pendanaan.

Menurut Tjiptoherijanto (2003) menyebutkan bahwa mobilitas penduduk semakin tinggi di waktu mendatang. Pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain akan lebih intensif di masa depan. Apalagi didukung dengan semakin baiknya sarana transportasi dan semakin mudahnya memiliki kendaraan pribadi, tidak mustahil tingkat mobilitas nonpermanen akan semakin meninggi. Mobilitas penduduk yang tinggi salah satunya dapat disebabkan oleh terjadinya migrasi atau

perpindahan penduduk. Migrasi atau perpindahan penduduk dapat terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara penduduk dengan lingkungannya. Jika penduduk bertambah banyak sedangkan lingkungan atau tempat tidak mencukupi kebutuhan penduduk, maka jalan keluarnya adalah dengan melakukan migrasi (Syahrain, 2019).

Permasalahan migrasi yang sering terjadi adalah adanya faktor pendorong dan penarik bagi individu dalam melakukan migrasi. Salah satu faktornya adalah sebaran dan distribusi penduduk yang tidak merata (Susilowati, 2005). Migrasi juga dipengaruhi oleh tidak meratanya fasilitas pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Akibat dari ketidakmerataan ketersediaan fasilitas pembangunan, mendorong pekerja di wilayah tersebut untuk melakukan migrasi ke wilayah lain yang dianggap kondisinya lebih baik, misalnya dari wilayah pedesaan ke perkotaan (Mujiburrahmad, dkk. 2021).

Persoalan migrasi masyarakat desa ke kota juga cenderung dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi mendorong munculnya pergerakan migrasi, bukan saja sebagai faktor pendorong yang berasal dari sektor pertanian atau dari desanya sendiri. Akan tetapi ada juga faktor penarik dari sektor industri di daerah perkotaan, seperti misalnya gaji yang lebih tinggi (Todaro dan Smith, 2015). Mantra (2015) menyatakan bahwa keinginan utama seseorang bermigrasi dari desa ke kota karena adanya motif ekonomi, seperti keinginan untuk mendapatkan pendapatan dan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan yang didapatkan di daerah asalnya.

Tujuan dari migrasi itu sendiri adalah meningkatkan taraf hidup migran dan keluarganya, sehingga pada umumnya mereka akan mencari pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi di daerah tujuan. Dengan kata lain mereka akan lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Kondisi seperti inilah yang mendorong masyarakat memilih untuk melakukan proses migrasi (Syahrain, 2019).

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terluas di Indonesia dimana jumlah penduduknya mencapai 6.092.455 jiwa dan tingkat kepadatan 12 jiwa per kilometer. Tingginya jumlah penduduk di pulau Sumatera tentu tidak hanya diisi oleh penduduk lokal namun juga diisi oleh penduduk migran dari berbagai pulau sebagai akibat dari salah satu program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintahan pada masa orde baru. Hal ini menyebabkan aglomerasi atau pemusatan penduduk di beberapa kawasan pulau Sumatera seperti di Banda Aceh, Medan, Duri, Dumai, Palembang, dan Metro Lampung. Pulau Sumatera yang mempunyai kekayaan sumber daya alam tentu memiliki daya tarik tersendiri untuk seseorang melakukan migrasi. Tabel 1-1 menunjukkan jumlah migrasi masuk di Indonesia pada tahun 2015-2020.

Tabel 1-1
Jumlah Migrasi Masuk di Indonesia Tahun 2015-2020 (Jiwa)

Provinsi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	32.150	35.045	39.477	39.012	47.119	46.695
Sumatera Utara	123.967	115.972	171.890	174.539	196.013	202.688
Sumatera Barat	111.230	116.007	134.582	164.433	176.914	135.379
Riau	187.537	216.482	223.510	189.461	175.668	195.100
Jambi	69.616	57.336	49.339	57.206	51.408	49.296
Sumatera Selatan	81.734	82.014	104.056	108.443	100.475	96.024
Bengkulu	33.323	34.844	40.151	36.300	44.068	42.953
Lampung	75.602	97.113	105.943	117.535	115.286	107.179
Bangka-Belitung	33.230	31.003	34.606	32.163	31.177	26.752
Kepulauan Riau	140.666	128.658	169.986	137.106	190.782	128.212
DKI Jakarta	423.153	455.728	484.154	455.350	466.476	407.971
Jawa Barat	691.417	692.311	1.011.000	902.840	894.530	811.700
Jawa Tengah	504.019	485.797	665.562	688.255	690.217	639.777
D I Y	179.042	204.065	217.726	232.563	264.645	228.982
Jawa Timur	297.447	349.622	447.082	494.560	450.753	437.071
Banten	324.946	289.981	276.556	290.453	307.005	229.730
Bali	96.586	133.143	134.939	117.010	123.287	118.640
Nusa Tenggara Barat	54.093	68.980	103.303	16.487	121.322	107.409
Nusa Tenggara Timur	46.853	61.916	102.388	89.506	90.218	97.252
Kalimantan Barat	27.201	35.557	40.212	41.789	28.876	39.873
Kalimantan Tengah	85.286	64.253	66.333	78.807	63.234	67.282
Kalimantan Selatan	84.246	90.457	93.316	87.886	88.168	84.005
Kalimantan Timur	103.972	113.602	136.562	128.337	136.808	112.195
Kalimantan Utara	19.715	39.608	42.312	31.380	34.819	31.421
Sulawesi Utara	20.288	28.448	41.971	35.753	38.584	40.357
Sulawesi Tengah	52.716	53.440	53.818	53.655	49.990	47.926
Sulawesi Selatan	115.399	141.052	232.566	190.260	173.257	176.171
Sulawesi Tenggara	51.363	52.160	53.406	69.958	57.146	53.218
Gorontalo	18.578	20.282	17.543	18.941	22.368	18.191
Sulawesi Barat	28.874	31.450	28.608	41.581	41.906	38.173
Maluku	21.423	20.776	20.740	26.276	35.498	32.513
Maluku Utara	14.792	18.344	20.237	28.043	19.771	20.004
Papua Barat	35.943	34.973	39.401	47.992	43.807	39.904
Papua	42.310	49.919	63.433	87.576	68.882	56.656

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, berbagai terbitan.

Berdasarkan Tabel 1-1 menunjukkan bahwa jumlah penyebaran penduduk yang melakukan aktivitas migrasi di seluruh provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi yang berbeda-beda setiap tahunnya. Provinsi yang menjadi tujuan migrasi yang paling tinggi salah satunya terletak di pulau Sumatera dengan provinsi yang menjadi tujuan migran paling tinggi adalah provinsi Riau dengan jumlah migran 1.187.758 jiwa pada tahun 2015-2020 kemudian disusul oleh provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Riau dengan jumlah migran 985.069 dan 895.410 jiwa. Hal itu dikarenakan provinsi tersebut memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah seperti kelapa sawit, migas, dan karet yang membuat seseorang berdatangan ke wilayah tersebut untuk mengelola SDA yang ada dan dijadikan sebagai tempat untuk mencari penghasilan bagi banyak orang yang pada akhirnya menjadi dorongan untuk seseorang menetap di wilayah tersebut. Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk migrasi yang paling rendah pada tahun 2015-2020 adalah provinsi Gorontalo dengan jumlah migran 97.712 jiwa disusul oleh provinsi Maluku Utara dan Maluku dengan jumlah migran sebanyak 121.191 dan 157.226 jiwa.

Migrasi terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah investasi. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sutawijaya, 2010).

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan masyarakat untuk terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja sehingga meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Investasi juga bisa dialokasikan untuk membiayai fasilitas sektor publik yang penting, di antaranya kelengkapan fasilitas dan infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan migrasi (Zhao, 1999).

Migrasi penduduk juga dipengaruhi oleh besarnya upah yang diterima. Besarnya migrasi penduduk saat ini juga disebabkan oleh perbedaan antara upah yang diharapkan yang terjadi di pedesaan dan perkotaan. Pemberian upah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan mendorong masyarakat untuk mencari upah yang lebih dengan melakukan migrasi ke wilayah lain untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang lebih tinggi guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Fenomena ini sejalan dengan teori Todaro yang mengungkapkan bahwa migran akan memutuskan untuk melakukan migrasi jika penghasilan bersih di kota melebihi penghasilan yang ada di desa (Todaro dan Smith, 2015).

Tinggi atau rendahnya indeks pembangunan manusia juga akan mempengaruhi migrasi penduduk. IPM merupakan wujud perhitungan skala keberhasilan pembangunan manusia. Todara dan Smith (2015) menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan suatu elemen penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kemampuan dan memperluas kapasitas seseorang. Sementara Rustariyuni (2013) menemukan bahwa pendidikan yang tinggi juga akan

mempengaruhi pola pikir individu untuk dapat bersaing di dunia kerja serta mendorong untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik dari daerah asal.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi migrasi penduduk adalah tingkat kesempatan kerja. Menurut Sagir (1995) Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah penduduk atau orang yang bekerja atau yang sudah memperoleh pekerjaan, semakin banyak orang yang bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi dengan demikian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan. Todaro dan Smith (2015) mengatakan bahwa migrasi terjadi karena kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan berkaitan langsung dengan kesempatan atau peluang kerja, sehingga semakin tingginya kesempatan kerja yang ada di suatu wilayah maka akan mendorong seseorang untuk melakukan migrasi ke wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis ingin menganalisis pengaruh investasi, upah, indeks pembangunan manusia dan kesempatan kerja terhadap migrasi penduduk di pulau Sumatera pada tahun 2015-2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap migrasi penduduk di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2020?

2. Bagaimana pengaruh upah terhadap migrasi penduduk di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2020?
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap migrasi penduduk di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2020?
4. Bagaimana pengaruh kesempatan kerja terhadap migrasi penduduk di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh investasi terhadap migrasi penduduk di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2020.
2. Menganalisis pengaruh upah terhadap migrasi penduduk di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2020.
3. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap migrasi penduduk di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2020.
4. Menganalisis pengaruh kesempatan kerja terhadap migrasi penduduk di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2020.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Badan pengembangan sumber daya manusia diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat dan siap bersaing di dunia kerja.

2. Dinas pendidikan diharapkan dapat untuk menyusun kebijakan yang lebih memudahkan akses pendidikan agar bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan fasilitas pendidikan untuk mengasihkan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan agar semakin banyak penanaman modal atau investasi yang masuk sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan menyerap tenaga kerja.
4. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat dan siap bersaing di dunia kerja.
5. Akademisi dan peneliti lain diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang terkait di masa yang akan datang.

E. Metode Analisis Data

Guna menganalisis pengaruh investasi, upah, indeks pembangunan manusia, dan kesempatan kerja terhadap migrasi penduduk di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2020, maka alat analisis yang di pakai adalah regresi data panel dengan formulasi mode estimator sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2009):

$$MGR_{it} = \beta_0 + \beta_1 INV_{it} + \beta_2 UPH_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 KK_{it} + u_{it}$$

Keterangan:

MGR	= migrasi penduduk (jiwa per tahun)
INV	= investasi (miliar rupiah per tahun)
UPH	= upah (rupiah per tahun)
TP	= indeks pembangunan manusia (persen per tahun)

KK	= kesempatan kerja (persen per tahun)
β_0	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= koefisien regresi variabel independen
i	= provinsi ke i
t	= tahun ke t
u	= unsur kesalahan (<i>error term</i>)